



PENGGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Perspektif Kesehatan Masyarakat

**M. Kamali Zaman, SKM., M.KL
Winda Septiani, SKM., M.Kes.
Ahmad Satria Efendi, SKM., M.Kes.**



Editor:
Nila Puspita Sari, SKM, MKM

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

M. Kamali Zaman, SKM., M.KL.

Winda Septiani, SKM., M.Kes.

Ahmad Satria Efendi, SKM., M.Kes

PENGERGANSIASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Perspektif Kesehatan Masyarakat



Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Perspektif Kesehatan Masyarakat

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-5874-79-1

vi + 111 hal; A5

Cetakan Pertama, Januari 2022

copyright © Januari 2022 Global Aksara Pers

Penulis : M. Kamali Zaman, SKM., M.KL, Winda Septiani, SKM.,
M.Kes, dan Ahmad Satria Efendi, SKM., M.Kes.

Penyunting : Nila Puspita Sari, SKM., MKM.

Desain Sampul : Ahmad Afif Hidayat

Layouter : Isa Saburai

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk
dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers

Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021, No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapers@gmail.com

Prakata Penulis

Buku ini telah disusun melalui tahapan yang cukup panjang, berisikan tentang fenomena masyarakat dalam upaya pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Buku ini berisikan bagaimana menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat, menciptakan atmosfer positif di masyarakat serta melakukan upaya problem solving terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dalam menyusun buku ini, tentunya banyak pihak yang terlibat diantaranya tim penulis serta pihak pihak yang telah disitasi karya ilmiahnya dalam tulisan ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, oleh sebab itu penulis sangat berbesar hati menerima kritik beserta saran melalui email kamalizaman@htp.ac.id

Daftar Isi

PRAKATA PENULIS	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 INTRODUCTION.....	2
BAB 2 PENGANTAR PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM).....	5
A. Pengorganisasian Masyarakat.....	5
B. Pengembangan Masyarakat.....	35
BAB 3 UPAYA PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM).....	43
A. Peranan Petugas PPM.....	43
B. Model-Model PPM.....	46
BAB 4 MOBILISASI MASYARAKAT	50
A. Kader Desa	52
B. Partisipasi Masyarakat	60
BAB 5 MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD).....	69
BAB 6 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	74
BAB 7 PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PPM.....	96
DAFTAR PUSTAKA	106
PROFIL PENULIS.....	109



PENGGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Perspektif Kesehatan Masyarakat

**M. Kamali Zaman, SKM., M.KL
Winda Septiani, SKM., M.Kes.
Ahmad Satria Efendi, SKM., M.Kes.**



Editor:
Nila Puspita Sari, SKM, MKM



INTRODUCTION

Kesehatan atau hidup sehat adalah hak setiap orang, oleh sebab itu kesehatan, baik individu, kelompok maupun masyarakat merupakan asset yang harus di jaga, dilindungi bahkan harus ditingkatkan. Setiap orang baik secara individu, kelompok maupun masyarakat dimana saja dan kapan saja mempunyai hak untuk hidup sehat atau memperoleh perlindungan kesehatan. Sebaliknya, setiap orang baik individu, kelompok maupun masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kesehatan dirinya dari segala ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya.

Sebagai perwujudan dari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memelihara dan melindungi kesehatannya,

setiap orang, baik individu, kelompok atau masyarakat harus mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk memelihara dan melindungi kesehatan mereka sendiri (kemandirian/*self reliance*). Dengan kata lain, masyarakat yang berdaya sebagai hasil dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat mandiri, demikian juga individu atau kelompok yang berdaya, juga individu atau kelompok mandiri.

Suatu masyarakat mempunyai ciri-ciri berikut:

1. mempunyai nilai-nilai umum yang diakui bersama;
2. mempunyai batasan hubungan normatif;
3. saling membutuhkan;
4. mengenal pemilikan;
5. mempunyai pembagian peran (tingkatan-tingkatan); dan
6. mencakup suatu wilayah tertentu

Pengembangan masyarakat secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

Dari devinisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pengembangan masyarakat, yaitu pengembangan

kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, mencari informasi, bertani dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu/masyarakat.

Perilaku yang yang perlu di ubah adalah perilaku yang tentunya merugikan individu atau msyarakat itu sendiri yang akan menghambat peningkatan kesejahteraannya. Contoh yang yang sering kita temui dalam seperti ibu hamil tidak boleh makan telur, anak tidak perlu sekolah, membicarakan rencana pembangunan desa hanya kaum laki-laki saja, dan lain sebagainya.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelolah kegiatan atau program yang mereka kembangkan, disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan dan lain-lain. Lembaga-lembaga yang ada sebaiknya perlu dilibatkan karena lembaga inilah yang sudah mapan, tinggal meningkatkan kemampuannya saja.



PENGANTAR PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM)

A. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat adalah konsep yang sudah dikenal dan dipakai oleh para pekerja sosial di Amerika pada akhir tahun 1800, sebagai upaya koordinatif memberikan pelayanan kepada imigrasi, kelompok miskin yang baru datang (Garvin dan Cox, 1987, Dalam Adi 2008).

Pengorganisasian masyarakat diperlukan sebagai serangkaian upaya membangun masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera, dan

lebih adil dibandingkan sebelumnya guna memperoleh harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Pengorganisasian masyarakat ini merupakan reaksi terhadap praktik-praktik pembangunan yang berdampak pada terinjak-injaknya harkat kemanusiaan, pemiskinan, dan pengurasan sumber daya alam secara luar biasa untuk kepentingan sebagian kecil manusia Masyarakat, terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti mata pencarian, tingkat penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Tujuan hidup setiap orang pun berbeda-beda. Namun demikian, mestinya setiap orang ingin agar taraf hidup keluarganya meningkat dari waktu ke waktu. Hanya mungkin belum tahu apa yang harus diperbuat selain apa yang sudah dijalani selama ini (Suhartini, 2005).

Boleh jadi sebagian anggota masyarakat mempunyai latar belakang mata pencarian yang sama, permasalahan yang dihadapi sama, dan bahkan nasib yang sama. Namun mereka bekerja sendiri-sendiri dan menghadapi masalah sendiri-sendiri pula. Apalah daya, nasib hampir tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, para anggota masyarakat yang mempunyai kesamaan latar belakang dan tujuan tersebut perlu berhimpun

dalam suatu wadah; wadah yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Wadah ini berupa organisasi masyarakat. Dengan berhimpun dalam wadah tersebut, para anggota dapat sering melakukan silaturahmi, kemudian dapat saling tukar informasi dan pengalaman.

Dengan demikian, mereka dapat melahirkan gagasan-gagasan baru dan secara tidak disadari, mereka membangun jaringan kerjasama. Ini berarti bahwa organisasi masyarakat merupakan sarana untuk pemberdayaan masyarakat. Bentuk dan namanya dapat saja beraneka ragam, misalnya kelompok usaha bersama pemandang ikan, perkumpulan pengolah ikan asap, koperasi serba usaha pengolah ikan, himpunan nelayan, serikat nelayan, dan semacamnya. Anggota kelompok perlu menyepakati aturan bersama demi kelancaran usaha atau kegiatan bersama dan memperoleh keuntungan bersama.

Pengorganisasian masyarakat atau CO adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan

dialog atau musyawarah yang demokratis (soetomo, 2006).

Usulan komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi masyarakat dalam merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting.

Pengorganisasian masyarakat bergerak dengan cara menggalang masyarakat kedalam suatu organisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Suara dan kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan kaum elit.

Pengorganisasian masyarakat juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat menunjang kemajuan masyarakat, namun titik tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumberdaya mereka.

Secara umum, metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan pengorganisasian masyarakat. Semua itu bertujuan

untuk melakukan transformasi sistem sosial yang dipandang menghisap masyarakat dan menindas (*represif*). Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berperikemanusiaan (*civil society*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, berkesejahteraan ekonomis, politik dan budaya.

Pengembangan masyarakat atau CD adalah pengembangan yang lebih mengutamakan sifat fisik masyarakat. CD mengutamakan pembangunan dan perbaikan atau pembuatan sarana-sarana sosial ekonomi masyarakat. Misalnya; pelatihan mengenai gizi, penyuluhan KB, bantuan hibah, bantuan sekolah dan sebagainya (Soetomo, 2011).

Dengan demikian, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan penggalian potensi-potensi sosial ekonomi yang ada lebih diutamakan untuk mensukseskan target yang telah ditetapkan oleh pihak luar.

a. Asumsi Dasar

Melakukan pengorganisasian masyarakat dengan maksud memperkuat (memberdayakan) sehingga masyarakat mampu mandiri dalam mengenali

persoalan-persoalan yang ada dan dapat mengembangkan jalan keluar (upaya mengatasi masalah tersebut) berangkat dari asumsi:

- 1) Masyarakat punya kepentingan terhadap perubahan (komunitas harus berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat);
- 2) Perubahan tidak pernah datang sendiri melainkan membutuhkan perjuangan untuk dapat mendapatkannya;
- 3) Setiap usaha perubahan (sosial) pada dasarnya membutuhkan daya tekan tertentu, dimana usaha memperkuat (daya tekan) juga memerlukan perjuangan.

b. Arah

Pengorganisasian adalah untuk mengembangkan peningkatan kapasitas dan daya tawar masyarakat (komunitas). Pemikiran ini bermuara pada prinsip demokrasi, yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, atau suatu proses dari, oleh dan untuk rakyat. Secara mendasar pengorganisasian diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dan disisi lain

mempersiapkan basis sosial bagi tatanan dan situasi yang baru dan lebih baik yang ingin diciptakan.

c. Pentingnya Pengorganisasian

Pengorganisasian masyarakat penting dilakukan karena:

- 1) Kenyataan bahwa masyarakat pada kebanyakan berposisi dan berada dalam kondisi lemah, sehingga diperlukan wadah yang sedemikian rupa dapat dijadikan wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas “bargaining”;
- 2) Kenyataan masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan, dimana sebagian kecil memiliki akses dan asset untuk bisa memperbaiki keadaan, sementara sebagian besar yang lain tidak. Kenyataan ini menjadikan perubahan pada posisi sebagai jalan yang paling mungkin untuk memperbaiki keadaan. Tentu saja pengorganisasian tidak selalu bermakna persiapan melakukan “perlawanan” terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu, tetapi juga dapat bermakna

sebagai upaya bersama dalam menghadapi masalah-masalah bersama seperti bagaimana meningkatkan produksi, memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

d. Substansi Pengorganisasian

Suatu pengorganisasian merupakan usaha untuk membangun kekuatan (keberdayaan) masyarakat, sehingga dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan di sisi lain masyarakat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, independen dan merdeka (tanpa paksaan) dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Harus diakui bahwa pada kebanyakan masyarakat tidak berada dalam keadaan kritis. Oleh sebab itu pengorganisasian memikul beban mendorong peningkatan kesadaran kritis masyarakat. Bagi organisator dan atau fasilitator pekerjaan ini berarti suatu usaha untuk memenangkan hati dan pikiran” masyarakat.

e. Inti Kerja Mengorganisasi Masyarakat

- 1) Membangun dan mengembangkan kesadaran kritis masyarakat dalam melihat persoalan-persoalan yang menghambat pencapaian keadaan yang lebih baik dan bermakna, seperti masalah mengapa posisi masyarakat lemah dan kondisi mereka “kurang beruntung.
- 2) Mendorong dan mengembangkan organisasi yang menjadi alat dalam melakukan perjuangan kepentingan masyarakat;
- 3) Melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada perbaikan keadaan dalam kapasitas yang paling mungkin, dan dengan kalkulasi kekuatan yang cermat, serta melalui pentahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap-tahap perkembangan masyarakat yang dinamis.

f. Prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat

Berangkat dari definisi dan pengertian pengorganisasian masyarakat, agar tujuannya dapat terwujud dan tidak keluar dari kerangka kerja pengorganisasian masyarakat maka ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Keberpihakan

Pengorganisasian masyarakat harus menitikberatkan pada lapisan bawah yang selama ini selalu dipinggirkan, sehingga yang menjadi basis pengorganisasian adalah masyarakat kelas bawah, tanpa mempunyai prioritas keberpihakan terhadap masyarakat kelas bawah seringkali pengorganisasian yang dilakukan terjebak pada kepentingan kelas menengah dan elit dalam masyarakat.

2) Pendekatan holistik

Pengorganisasian masyarakat harus melihat permasalahan yang ada dalam masyarakat secara utuh dan tidak sepotong-sepotong, misalnya; hanya melihat aspek ekonomi saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek sehingga pengorganisasian yang dilaksanakan untuk mengatasi berbagai aspek dalam masyarakat.

3) Pemberdayaan

Muara dari pengorganisasian masyarakat adalah agar masyarakat berdaya dalam menghadapi pihak-pihak di luar komunitas

(pelaku pembangunan lain; pemerintah, swasta atau lingkungan lain pasar, politik, dsb), yang pada akhirnya posisi tawar masyarakat meningkat dalam ber hubungan dengan pemerintah dan swasta.

4) HAM

Kerja-kerja pengorganisasian masyarakat tidak boleh bertentangan dengan HAM.

5) Kemandirian

Pelaksanaan pengorganisasian masyarakat harus ditumpukan pada potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga penggalan keswadayaan masyarakat mutlak diperlukan. Dengan demikian apabila ada faktor luar yang akan terlibat lebih merupakan stimulan yang akan mempercepat proses perubahan yang dikehendaki. Apabila hal kemandirian tidak bisa diwujudkan, makaketergantungan terhadap faktor luar dalam proses pengorganisasian masyarakat menjadi signifikan. Kemandirian menjadi sangat penting karena perubahan dalam masyarakat hanya bisa terjadi dari masyarakat itu sendiri.

6) Berkelanjutan

Pengorganisasian masyarakat harus dilaksanakan secara sistematis dan masif, apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat, oleh sebab itulah dalam melaksanakan pengorganisasian masyarakat harus mampu memunculkan kader-kader masyarakat dan pengorganisasi lokal, karena merekalah yang akan terus mengembangkan pengorganisasian yang sudah jalan sehingga kegiatan ini terjamin keberlanjutannya.

7) Partisipatif

Salah satu budaya yang dilahirkan oleh Orde Baru adalah 'budaya bisu' dimana masyarakat hanya dijadikan alat untuk legitimasi dari kepentingan kelompok dan elit. Kondisi semacam ini tercermin dari kegiatan pengerahan masyarakat untuk mencapai kepentingan-kepentingan sesaat, oleh sebab itulah dalam pengorganisasian masyarakat harus diupayakan keterlibatan semua pihak terutama masyarakat kelas bawah. Partisipasi

yang diharapkan adalah partisipasi aktif dari anggota sehingga akan melahirkan perasaan memiliki dari organisasi yang akan dibangun.

8) Keterbukaan

Sejak awal dalam pengorganisasian masyarakat harus diupayakan keterbukaan dari semua pihak, sehingga bisa dihindari intrik dan provokasi yang akan merusak tatanan yang telah dibangun. Pengalaman yang ada justru persoalan keterbukaan inilah yang banyak menyebabkan perpecahan dan pembusukan dalam organisasi masyarakat yang telah dibangun.

9) Tanpa kekerasan

Kekerasan yang dilakukan akan menimbulkan kekerasan yang lain dan pada akhirnya menjurus pada anarkhisme, sehingga diupayakan dalam berbagai hal dalam pengorganisasian masyarakat harus mampu menghindari bentuk-bentuk kekerasan baik fisik maupun psikologi dengan demikian proses yang dilakukan bisa menarik simpati

dan dukungan dari berbagai kalangan dalam melakukan perubahan yang akan dilaksanakan.

10) Praxis

Proses pengorganisasian masyarakat harus dilakukan dalam lingkaran Aksi-Refleksi-Aksi secara terus menerus, sehingga semakin lama kegiatan yang dilaksanakan akan mengalami peningkatan baik secara kuantitas dan terutama kualitas, karena proses yang dijalankan akan belajar dari pengalaman yang telah dilakukan dan berupaya untuk selalu memperbaikinya.

11) Kestaraan

Budaya yang sangat menghambat perubahan masyarakat adalah tinggalkan budaya feodal. Oleh sebab itu pembongkaran budaya semacam ini bisa dimulai dengan kestaraan semua pihak, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi (superior) dan merasa lebih rendah (inferior), dengan demikian juga merupakan pendidikan bagi kalangan kelas bawah untuk bisa memandang secara sama kepada kelompok-kelompok lain yang ada dalam

masyarakat, terutama dalam berhubungan dengan pemerintah dan swasta.

Yang perlu dipikirkan mengenai pengorganisasian masyarakat:

- a) Mengutamakan yang terabaikan (pemihakan kepada yang lemah dan miskin)
- b) Merupakan jalan memperkuat masyarakat, bukan sebaliknya
- c) Masyarakat merupakan pelaku, pihak luar hanya sebagai fasilitator
- d) Merupakan proses saling belajar
- e) Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan capaian
- f) Bersedia belajar dari kesalahan
- g) Terbuka, bukan merupakan usaha pembentukan kelompok eksklusif

Pengorganisasian masyarakat dan perencanaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pengorganisasian masyarakat tidak akan terlepas dari upaya perencanaan sosial yang mendukung terlaksananya penguatan partisipasi

anggota masyarakat dalam mendukung penguatan institusi Bank Sampah.

Dalam merencanakan pengorganisasian masyarakat terdapat 4 pandangan praktis yang bertujuan melakukan penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh antara lain:

- 1) *Strengthening community participation and integration* (Penguatan partisipasi masyarakat dan terintegrasi) Untuk mendorong ekspresi ditinjau dari semua kelompok dalam masyarakat dan mencapai interaksi yang efektif diantara mereka, mengarah pada kesepakatan untuk memperbaiki lingkungan bersama mereka.
- 2) *Enhancing coping capacities* (Meningkatkan kapasitas pertahanan diri) Berkonsentrasi pada peningkatan sarana komunikasi dan interaksi dalam rangka membangun kemampuan masyarakat untuk mengatasi lingkungan dan bersama melakukan perubahan.

- 3) *Improving social conditions and services* (Menyesuaikan dengan kondisi sosial dan pelayanan) Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dengan mengembangkan ketentuan yang efektif dan metode untuk memecahkan atau mencegah masalah sosial.
- 4) *Advancing the interests of disadvantaged groups* (Memperjuangkan kepentingan dari kelompok yang tidak beruntung). Untuk mempromosikan kepentingan kelompok-kelompok tertentu dengan meningkatkan bagian mereka dari barang dan jasa dan / atau bahan dengan meningkatkan kekuatan mereka, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan masyarakat, dan status mereka.

Perencanaan pengorganisasian masyarakat miskin melalui Bank Sampah dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan berdasarkan perspektif penguatan partisipasi masyarakat dengan kegiatan yang terintegrasi. Membangun kapasitas masyarakat untuk mengatasi permasalahan dilingkungannya.

Mengembangkan metode pemecahan masalah berdasarkan kondisi sosial dan pelayanan yang dibutuhkan. Dan mempromosikan kepentingan kelompok yang kurang beruntung dengan meningkatkan peran serta mereka melalui upaya peningkatan kekuatan dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di komunitas.

Sebagai suatu proses perencanaan organisasi menurut Sheafor dan Horejsi (2002) ada 3 tipe perencanaan yaitu:

1) *Problem-Solving Planning* (Perencanaan Pemecahan masalah)

Perencanaan Pemecahan masalah memiliki rentang waktu pelaksanaan berkisar 60 sampai 90 hari berfokus pada beberapa masalah yang berdampak pada kegiatan yang biasa. Prosesnya terdiri dari (1) mengidentifikasi dan mempelajari masalah, (2) menseleksi suatu rancangan dari perbaikan aksi atau maksudnya, (3) merencanakan pelaksanaan yang dimaksudkan, dan (4) Memonitoring efektifitas dari perbaikan aksi.

2) *Operational Planning* (Perencanaan Operasional)

Perencanaan operasional memiliki rentang waktu pelaksanaan paling pendek 6-12 Bulan atau telah memiliki suatu siklus penganggaran. Perencanaan proses memformulasikan tujuan, detail standar operasional dan prosedur, dan mempersiapkan suatu perencanaan aksi untuk mengimplementasikan tujuan.

3) *Strategic Planning* (Perencanaan Strategis)

Perencanaan strategis dipersiapkan mengcover kegiatan untuk suatu periode 3 sampai 10 tahun. Pada dasarnya proses perencanaan strategis dipersiapkan untuk mengembangkan suatu perencanaan sebagai upaya pencapaian misi organisasi atau tujuan jangka panjang.

g. Aspek pengorganisasian masyarakat

1) Proses

- a) Merupakan proses yang terjadi secara sadar, tetapi mungkin juga tidak
- b) Dalam proses ditemukan unsur-unsur kesukarelaan. Kesukarelaan timbul karena

keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya

- c) Kesukarelaan juga terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok atau masyarakat
- d) Kesadaran terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi biasanya ditemukan pada segelintir orang yang kemudian melakukan upaya menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya.

2) Masyarakat

- a) Kelompok yang mempunyai batas-batas geografis: Desa, kelurahan, kecamatan, dst
- b) Suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar
- c) Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar
- d) Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya

3) Berfungsinya masyarakat

Langkah/upaya mengfungsikan masyarakat:

- a) Menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.
- c) Melakukan upaya penyebaran rencana atau kampanye untuk mensukseskan rencana tersebut

h. Langkah-langkah pengorganisasian masyarakat

Adapun tindak lanjut yang dimaksud meliputi tahapan langkah-langkah pengorganisasian masyarakat yang terdiri dari:

- 1) Langkah integrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh organisator dengan meleburkan dirinya dalam masyarakat sehingga diterima

masyarakat dan memahami kondisi masyarakat.

- 2) Riset sosial, yaitu dengan mempelajari lebih mendalam situasi sosio-kultural, historis dan masalah yang ada di masyarakat.
- 3) Program tentatif, yaitu menyusun serangkaian kegiatan yang dapat mendorong masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara efektif dalam melakukan aktivitas penanganan masalah.
- 4) Aktivitas pemberdayaan, yaitu dengan membangun kesadaran melalui motivasi dan nilai-nilai moralitas.
- 5) Pertemuan dan Role Playing, yang melakukan pembahasan secara formal sehingga terdapat legitimasi dari masyarakat mengenai tindak lanjut pelaksanaan upaya yang akan dilakukan dalam penanganan masalah. Di samping itu, disiapkan pula langkah-langkah tindak lanjutnya agar jelas bagi masyarakat untuk terlibat.
- 6) Pelaksanaan Aksi, yaitu melakukan kegiatan pengorganisasian masyarakat dalam

penanganan masalah. Dalam hal ini perlu diidentifikasi jenis aksi, metode aksi, struktur aksi, tujuan dan target aksi.

7) Evaluasi, yaitu dengan melakukan kajian ulang mengenai proses maupun dari aktivitas pengorganisasian masyarakat.

i. Beberapa metode dan media pengorganisasian masyarakat

Setelah mengetahui pola dan langkah-langkah pengorganisasian masyarakat, perlu diketahui pula metode dan media yang memungkinkan untuk digunakan dalam proses pengorganisasian.

Pentingnya mengetahui metode dan media pengorganisasian masyarakat karena sarana yang akan digunakan akan membuat langkah-langkah yang sudah disusun dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Di samping itu, dalam pengorganisasian masyarakat adalah penting dalam upaya memenangkan dukungan dan pemikiran masyarakat.

Beberapa bentuk metode dan media pengorganisasian masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Diskusi, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal (privat). Diskusi formal dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat dari segala macam lapisan. Sedangkan diskusi informal (privat) adalah diskusi yang melibatkan komunitas secara lebih spesifik
- 2) Pelatihan, yang ditujukan pada anggota masyarakat yang nantinya akan mampu menjadi aktor utama dalam pengorganisasian masyarakat.
- 3) Bentuk-bentuk aksi juga dapat menjadi sarana pengorganisasian masyarakat dimana suatu aksi yang memberikan impresi yang positif di mata masyarakat juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi dalam pengorganisasian tersebut.
- 4) Salah satu sarana lainnya adalah sarana yang memiliki karakter penyebaran yang lebih luas dan merata yaitu kampanye dan sosialisasi. Sarana ini dapat dilakukan

dalam berbagai cara yaitu dalam bentuk selebaran, radio komunitas, buletin/buku, majalah/koran, video dan seni pertunjukan.

Adanya langkah-langkah pengorganisasian berikut metode dan media pendukung tidak akan efektif apabila kita tidak memperhatikan pembagian tugas, pengenalan wilayah, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan transformasi dalam pengorganisasian masyarakat.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pengorganisasian Masyarakat adalah:

a. Persiapan Sosial

Tujuan persiapan sosial adalah mengajak berpartisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan, sampai dengan perencanaan program, pelaksanaan hingga pengembangan program kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam persiapan sosial ini lebih ditekankan kepada persiapan-persiapan yang harus dilakukan

baik aspek teknis, administratif dan program-program kesehatan yang akan dilakukan.

- 1) Tahap Pengenalan Masyarakat. Dalam tahap awal ini kita harus datang ketengah-tengah masyarakat dengan hati yang terbuka dan kemauan untuk mengenal sebagaimana adanya, tanpa disertai prasangka buruk sambil menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) Tahap Pengenalan Masalah. Dalam tahap ini dituntut suatu kemampuan untuk dapat mengenal masalah-masalah yang memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menyusun skala prioritas penanggulangan masalah adalah:
 - a) Beratnya Masalah. Seberapa jauh masalah tersebut menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
 - b) Mudahnya Mengatasi.
 - c) Pentingnya Masalah bagi Masyarakat, yang paling berperan disini adalah

subyektivitas masyarakat sendiri dan sangat dipengaruhi oleh kultur budaya setempat

d) Banyaknya Masyarakat yang Merasakan Masalah, misalnya perbaikan gizi, akan lebih mudah dilaksanakan diwilayah yang banyak balitanya.

3) Tahap Penyadaran Masyarakat. Tujuan tahap ini adalah menyadarkan masyarakat agar mereka tentang tahu dan mengerti masalah-masalah kesehatan yang mereka hadapi sehingga dapat berpartisipasi dalam penanggulangannya serta tahu cara memenuhi kebutuhan akan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada.

Agar masyarakat dapat menyadari masalah dan kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan, diperlukan suatu mekanisme yang terencana dan terorganisasi dengan baik, untuk itu

beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka menyadarkan masyarakat:

- a) Lokakarya Mini Kesehatan.
- b) Musyawarah Masyarakat Desa. (MMD).
- c) Rembuk Desa.

b. Pelaksanaan

Setelah rencana penanggulangan masalah disusun dalam lokakarya mini, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat adalah:

- 1) Pilihlah kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- 2) Libatkan masyarakat secara aktif dalam upaya penanggulangan masalah.
- 3) Kegiatan agar disesuaikan dengan kemampuan, waktu, sumber daya yang tersedia di masyarakat.

- 4) Tumbuhkan rasa percaya diri masyarakat bahwa mereka mempunyai ke mampuan dalam penanggulangan masyarakat.

c. Evaluasi

Penilaian dapat dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penilaian dapat dilakukan dengan.

- 1) Penilaian selama kegiatan berlangsung
 - a) Disebut juga penilaian formatif = monitoring.
 - b) Dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan apakah telah sesuai dengan perencanaan penanggulangan masalah yang telah disusun.
- 2) Penilaian setelah Prgram selesai dilaksanakan
 - a) disebut juga penilaian sumatif = penilaian akhir program.
 - b) Dilakukan setelah melalaui jangka waktu tertentu dari kegiatan yang dilakukan.

- c) Dapat diketahui apakah tujuan atau target dalam pelayanan kesehatan telah tercapai atau belum.
- d) Perluasan yang merupakan pengembangan dari kegiatan yang dilakukan dan dapat dilaksanakan dalam 2 cara:
- ✓ Perluasan Kuantitatif. Perluasan dengan menambah jumlah kegiatan yang dilakukan, baik pada wilayah setempat maupun pada wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
 - ✓ Perluasan Kualitatif. Perluasan dengan meningkatkan mutu atau kualitas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari masyarakat yang dilayani.

B. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat berusaha untuk memberdayakan individu dan kelompok orang dengan menyediakan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan perubahan di komunitas mereka sendiri. Keterampilan ini sering diciptakan melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial yang besar bekerja untuk sebuah agenda bersama. Komunitas pengembang harus memahami baik bagaimana bekerja dengan individu dan bagaimana mempengaruhi posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih besar.

Pengembangan masyarakat melibatkan perubahan hubungan antara orang biasa dan orang-orang dalam posisi kekuasaan, sehingga setiap orang dapat mengambil bagian dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dimulai dari prinsip bahwa dalam masyarakat manapun ada banyak pengetahuan dan pengalaman yang jika digunakan dengan cara yang kreatif, dapat disalurkan ke dalam tindakan kolektif untuk mencapai tujuan masyarakat yang diinginkan.

Komunitas praktisi pembangunan bekerja bersama orang-orang di masyarakat untuk membantu

membangun hubungan dengan orang-orang kunci dan organisasi dan untuk mengidentifikasi masalah umum. Mereka membuka kesempatan bagi masyarakat untuk belajar keterampilan baru dan, dengan memungkinkan orang untuk bertindak bersama-sama, komunitas praktisi pembangunan membantu mengembangkan inklusi sosial dan kesetaraan.

Setiap usaha yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat hendaknya menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Ciptakan kondisi agar potensi/kemampuan masyarakat setempat dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Potensi setempat seringkali tidak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat karena adanya berbagai hambatan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan mengenal hambatan-hambatan ini untuk selanjutnya bersama masyarakat menciptakan suatu kondisi agar potensi yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup.
- b. Tingkatkan mutu potensi yang ada. Tergalinya potensi setempat harus diikuti dengan peningkatan mutu agar dapat diperoleh manfaat yang optimal.

Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengikutsertakan masyarakat setempat sejak awal kegiatan hingga pelaksanaan dan perluasan kegiatan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat non formal.

- c. Usahakan kelangsungan kegiatan yang sudah ada. Terlaksananya kegiatan sebagai wujud pemanfaatan potensi yang ada bukanlah suatu tujuan akhir, tetapi harus diusahakan agar kegiatan tersebut tidak berhenti begitu saja tetapi diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain sebagai hasil daya cipta masyarakat. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah:
 - 1) Setiap kegiatan harus menimbulkan kepuasan agar timbul gairah dan daya cipta dari seluruh komponen masyarakat.
 - 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus berkelanjutan.
 - 3) Harus ada latihan untuk pembentukan kader yang diikuti dengan usaha meningkatkan keterampilan.

- d. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan akhir dari peningkatan pengembangan masyarakat adalah agar proses pengembangan tersebut mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan bertitik tolak dari pengertian tentang pengembangan masyarakat seperti telah diuraikan tersebut diatas, maka masyarakat merupakan subjek dari kegiatan yang menjadi sasaran kegiatan.

Peranan lembaga dari luar hanyalah sebagai perangsang agar proses yang terjadi berjalan secara optimal. Dengan demikian, maka penjabarannya secara operasional dilaksanakan dengan cara:

- a. Berikan kesempatan agar masyarakat sendiri yang menentukan masalah kesehatannya, baik yang dihadapi secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat.
- b. Berikan kesempatan agar masyarakat sendiri yang membuat analisa dan kemudian menyusun perencanaan penanggulangan masalah.

- c. Berikan kesempatan agar masyarakat sendiri yang mengorganisir diri untuk melaksanakan usaha perbaikan tersebut.
- d. Dalam proses ini sedapat mungkin digali sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat sendiri dan kalau betul-betul diperlukan dimintakan bantuan dari luar.

Dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek kegiatan, maka tujuan yang diinginkan dalam pengembangan masyarakat adalah:

- a. Menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri.
- b. Menimbulkan rasa bangga, semangat dan gairah kerja.
- c. Meningkatkan dinamika masyarakat untuk membangun.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam program pengembangan masyarakat, terkandung unsur-unsur penting sebagai berikut:

- a. Program terencana dan terfokus pada kebutuhan-kebutuhan menyeluruh dari masyarakat yang bersangkutan.

- b. Mendorong swadaya masyarakat.
- c. Adanya bantuan teknis dari pemerintah maupun badan-badan swadaya atau organisasi-organisasi sukarela yang meliputi tenaga atau personel, peralatan, bahan dan dana bersifat sementara dan tidak menimbulkan ketergantungan.
- d. Mempersatukan berbagai spesialisasi seperti kesehatan, pertanian, peternakan, pendidikan dll untuk membantu masyarakat.

Pengembangan masyarakat adalah proses memampukan masyarakat 'dari, oleh dan untuk' masyarakat itu sendiri berdasarkan kemampuan sendiri. Secara terperinci prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, khususnya bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan potensi masyarakat.
- b. mengembankan gotong royong masyarakat.
- c. menggali kontribusi masyarakat.
- d. menjalin kemitraan.
- e. Desentralisasi.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut Yunus 2004, ada lima prinsip dasar yang patut diperhatikan:

- a. keperdulian terhadap masalah, kebutuhan dan potensi/sumberdaya masyarakat;
- b. kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program;
- c. fasilitasi (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan;
- d. adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam proses kegiatan dan

- e. mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.



UPAYA PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM)

A. Peran Petugas PPM

Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan dalam pengembangan dan pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan adalah bekerjasama dalam masyarakat bukan bekerja untuk masyarakat. Oleh karena itu peran petugas atau sektor kesehatan adalah:

- a. Memfasilitasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program pengembangan, misalnya masyarakat ingin membangun pengadaan air bersih, maka peran petugas adalah

memfasilitasi pertemuan-pertemuan anggota masyarakat dengan pemerintah daerah setempat dan pihak lain yang dapat membantu dalam mewujudkan pengadaan air bersih tersebut.

- b. Memotifasi masyarakat untuk bekerja sama atau bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan atau program bersama untuk kepentingan berdamai di dalam masyarakat tersebut.
- c. Mengalihkan pengetahuan teknologi dan keterampilan kepada masyarakat agar sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka kemandirian mereka.

Untuk menentukan seseorang sebagai “Community Worker” atau “Promotor Kesehatan Desa (Promokesa)”, harus memiliki sebagai berikut:

- a. Mampu menggunakan berbagai pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat.
- b. Mampu mengajak masyarakat untuk bekerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat.

- c. Mengetahui dengan baik sumber daya dan sumber alam yang ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.
- d. Mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat, menggunakan metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sehingga informasi dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- e. Mempunyai kemampuan profesional dalam berhubungan dengan masyarakat baik formal leader maupun informal leader.
- f. Mempunyai pengetahuan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keadaan lingkungannya.
- g. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan yang dapat diajarkan kepada masyarakat.
- h. Mengetahui dinas-dinas terkait dan ahli yang ada di wilayah tersebut untuk dimintakan bantuan keikutsertaannya dalam memecahkan masalah masyarakat.

B. Model-Model PPM

Jack Rothman mengartikan pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk intervensi pada tingkat masyarakat yang diarahkan pada peningkatan atau perubahan lembaga masyarakat dan pemecahan masalah-masalah. Berdasarkan pengertian tersebut, Rothman membedakan tiga model pengorganisasian masyarakat, yaitu:

- a. Model A (Locality Development/Pengembangan Lokal), adalah kegiatan yang berorientasi pada proses, tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar pada masyarakat, menekankan pentingnya konsesus/kesepakatan, kerjasama, membangun identitas, kepedulian dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat. Proses pengorganisasian masyarakat dapat optimal jika adanya partisipasi masyarakat dalam menetapkan tujuan dan pelaksanaan tindakan.
- b. Model B (Social Planning/Perencanaan Sosial), adalah kegiatan yang mementingkan tercapainya tujuan, metoda pemecahan masalah yang bersifat rasional, empiris. Proses menekankan pada aspek teknis dalam penyelesaian masalah dengan melalui

perencanaan yang baik dan rasional, sedangkan partisipasi masyarakat sifatnya bervariasi tergantung dari permasalahan yang dihadapi.

- c. Model C (Social Action/Aksi Sosial), adalah kegiatan yang mempunyai tujuan mengadakan perubahan mendasar pada lembaga kemasyarakatan. Sasaran utamanya adalah penataan kembali struktur kekuasaan, sumber-sumber dan proses pengambilan keputusan.

Kelemahannya:

- a. Locality Development, sulitnya mendapatkan dukungan/partisipasi apabila bukan berasal dari wilayah geografis yang sama.
- b. Social Planning, membutuhkan tenaga ahli teknis dari luar, membuat masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memecakan masalah.

Ciri ciri masing masing model

- a. Tujuan. Dibedakan antara tujuan yang berorientasi kepada penugasan (task) dan kepada proses. Orientasi pada penugasan akan menekankan pada penyelesaian tugas -tugas yang diberikan untuk

penyelesaian masalah-masalah tertentu. Orientasi pada proses akan menekankan pembinaan kerjasama, partisipasi dan kepemimpinan setempat.

- 1) Model A: Berorientasi pada proses, terlihat dari banyaknya penggunaan metode dinamika kelompok.
- 2) Model B: Berorientasi pada penugasan.
- 3) Model C: Kadang-kadang berorientasi pada proses, kadang-kadang berorientasi pada penugasan.

b. Strategi dasar

- 1) Model A: Pencapaian konsensus (kesepakatan) dan menghindari konflik.
- 2) Model B: Pemecahan masalah secara rasional dan logis, untuk itu perlu mengumpulkan data dan analisa data sebelum membuat perencanaan yang baik.
- 3) Model C: Memanfaatkan konflik, konfrontasi dan aksi langsung.

c. Peran petugas

- 1) Model A: Petugas berperan sebagai enabler (membantu), yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengalami proses belajar, melalui kegiatan pemecahan masalah.
- 2) Model B: Petugas berperan sebagai seorang ahli (expert) dengan kemampuan teknis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- 3) Model C: Petugas berperan sebagai aktifis yang mampu memanfaatkan media massa dan dukungan politis.

d. Orientasi pada struktur kekuasaan

- 1) Model A: diikut sertakan sebagai patner dalam usaha mencapai tujuan.
- 2) Model B: penguasa merupakan sponsor.
- 3) Model C: struktur kekuasaan dijadikan sebagai sasaran perubahan.



MOBILISASI MASYARAKAT

Mobilisasi merupakan pengerahan seluruh anggota masyarakat untuk ikut aktif dalam suatu usaha demi kepentingan bersama. Dalam masyarakat Jawa terkenal dengan istilah “gugur gunung” yang berarti bersama-sama bergerak dalam menanggapi suatu proyek bersama untuk kepentingan semua orang.

Dalam masyarakat yang heterogen, kemungkinan untuk melakukan mobilisasi langsung menjadi kurang efektif dan terlalu lama, jalan lain yang kemungkinan dapat mengantisipasi hal tersebut adalah dengan pendekatan melalui organisasi-organisasi masyarakat yang ada, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat daftar organisasi yang ada.

2. Mengetahui kegiatan utama dan mengenal tokohnya.
3. Menganalisa kemungkinan yang mendukung ataupun yang menghambat program.
4. Membuat perkiraan kemungkinan hal-hal yang dapat membantu program dari setiap organisasi.
5. Mengatur strategi agar organisasi-organisasi yang netral dapat segera diajak masuk dalam program dan menetralkan organisasi-organisasi lain yang menentang.

Partisipasi yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bertanggung jawab, bukan asal ikut ramai-ramai tanpa mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan dan untuk apa ikut dalam usaha bersama itu. Partisipasi akan dapat mencapai hasil yang optimal apabila masing-masing telah mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari kegiatan bersama tersebut. Peranan yang diharapkan dari organisasi setempat sanga luas, diantaranya:

1. Pemberian fasilitas fisik, seperti: ruang untuk pertemuan, alat transportasi, dll.
2. Pemberian fasilitas non fisik, seperti: wibawa, mekanisme control, dukungan moral, bantuan pikiran, dll.

Di negara-negara yang sedang berkembang ,hamper sebagian besar warga masyarakatnya berada pada tingkata pendidikan dan sosial ekonomi rendah. hal ini mengakibatkan “terpendamnya”potensi-potensi yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan tarap hidupnya. Oleh karena itu dapat di pahami bahwa dalam keadaan seperti ini, prakarsa pembangunan hamper selalu dimulai oleh aparat pemerintah.

A. Kader Desa

Kader Desa merupakan Tenaga sukarela yang terdidik dan terlatih dalam bidang tertentu, yang tumbuh ditengah – tengah masyarakat dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan, meningkatkan, dan membina kesejahteraan masyarakat dengan rasa ikhlas tanpa pamrih dan didasari panggilan untuk melaksanakan tugas–tugas kemanusiaan.

Bertitik tolak dari pengertian ini, maka kader desa adalah wakil dari masyarakat yang akan merumuskan segala hal yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dan melakukan usaha – usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kader desa akan menjadi “*agent of change*” yang akan membawa norma – norma baru yang sesuai

dengan nilai tradisional mereka dan yang akan menggali segi-segi positif yang ada pada norma-norma tradisional masyarakat mereka.

Terkait dengan peran kader didalam masyarakat, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

Pembentukan KPM melalui tahapan sebagai berikut:

1. KPM dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/ Lurah
2. Pembentukan KPM dilakukan melalui proses pemilihan dari calon- calon KPM.
3. KPM berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat

Syarat- syarat calon KPM adalah:

1. Warga desa/kelurahan laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai komitmen untuk bekerja penuh waktu dalam membangun desa/kelurahan;
6. Mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda, dan sebagainya;
7. Batas umur yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi desa/ kelurahan;
8. Pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi desa/ kelurahan;
9. Mempunyai mata pencaharian tetap; dan
10. Memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh desa/kelurahan

KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:

1. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
2. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
3. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
4. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
5. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/ musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam melaksanakan tugas, KPM mempunyai fungsi:

1. Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
2. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan;
3. Penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
4. Pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
5. Penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
6. Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
7. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;

8. Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
9. Penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompokkelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
10. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
11. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPM mempunyai peran sebagai:

1. Pemercepat perubahan (enabler), yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan

- mengembangkan hubungan di antara pemeran/ stakeholders pembangunan dengan baik;
2. Perantara (mediator), yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya, dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
 3. Pendidik (educator), yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar-mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh
 4. Selama menjadi pendamping kepada masyarakat;
 5. Perencana (planner), yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat,

kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;

6. Advokasi (advocacy), yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan/Kepala Desa/Lurah untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
7. Aktivistis (activist), yaitu melakukan perubahan institusi
8. Onal yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang
9. Diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi
10. Konflik; dan

11. Pelaksana teknis (technical roles), yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan

B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Soetomo, 2006)

Mikkelsen (2003), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam tafsiran dan makna berbeda tentang partisipasi yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan, tetapi mereka tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah proses untuk membuat masyarakat menjadi lebih peka untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan sesuatu.
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan oleh dirinya sendiri.

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari definisi di atas belum mendapatkan batasan pengertian yang jelas, sehingga ada kemungkinan apa yang disebut partisipasi dalam suatu kegiatan belum tentu sama dengan kegiatan lainnya. Bagaimanapun luasnya interpretasi tentang partisipasi itu, suatu hal yang pasti ialah bahwa sebahagian besar dari kita sependapat bahwa partisipasi itu sesuatu hal yang baik dan merupakan strategi penting untuk pembangunan.

Nilai-Nilai Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu pendekatan atau jalan yang terbaik untuk pemecahan masalah-masalah kesehatan di negara-negara yang sedang berkembang, karena hal-hal berikut (Notoatmodjo, 2007):

- a. Partisipasi masyarakat adalah cara paling murah. Dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan, itu berarti diperoleh sumber daya dan dana dengan mudah untuk melengkapi fasilitas kesehatan mereka sendiri.

- b. Bila partisipasi itu berhasil, bukan hanya salah satu bidang saja yang dapat dipecahkan, tetapi dapat menghimpun dana dan daya.
- c. Partisipasi masyarakat membuat semua orang bertanggung jawab untuk kesehatannya sendiri.
- d. Partisipasi masyarakat didalam pelayanan kesehatan adalah rangsangan dan bimbingan dari atas, bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas. Ini adalah suatu pertumbuhan yang alamiah, bukan yang semu.
- e. Partisipasi masyarakat akan menjamin suatu perkembangan yang langsung, karena dasarnya adalah kebutuhan dan kesadaran masyarakat.
- f. Melalui partisipasi, setiap anggota masyarakat dirangsang untuk belajar berorganisasi, mengambil peran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing

Faktor-Faktor Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat

Menurut Cary dalam Notoatmodjo (2005), mengatakan bahwa partisipasi dapat tumbuh jika tiga kondisi berikut terpenuhi:

1. Merdeka untuk berpartisipasi, berarti ada kondisi yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Mampu untuk berpartisipasi, adanya kapasitas dan kompetensi anggota masyarakat sehingga mampu untuk memerikan sumbangan saran yang konstruktif untuk program.
3. Mau berpartisipasi, kemauan atau kesediaan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program.

Ketiga kondisi ini harus hadir secara bersama-sama. Apa bila orang mau dan mampu tetapi tidak merdeka untuk partisipasi, maka orang tidak akan berpartisipasi. Menurut Ross dalam Notoatmodjo (2005), terdapat tiga prakondisi tumbuhnya partisipasi, yaitu:

- a. Mempunyai pengetahuan yang luas dan latar belakang yang memadai sehingga dapat mengidentifikasi masalah, prioritas masalah dan melihat permasalahan secara komprehensif.
- b. Mempunyai kemampuan untuk belajar cepat tentang permasalahan, dan belajar mengambil keputusan.
- c. Kemampuan mengambil tindakan dan bertindak efektif.

Batasan diatas sebenarnya menuntut persyaratan bahwa orang-orang yang akan berpartisipasi akan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kognisi tertentu. Menurut Notoatmodjo (2005), yang mengutip pendapat Chapin, partipasi dapat diukur dari tinggi rendah sampai yang tertinggi, yaitu:

- a. Kehadiran individu dalam pertemuan-pertemuan
- b. Memberikan bantuan dan sumbangan keuangan
- c. Keanggotaan dalam kepanitiaan
- d. Posisi kepemimpinan.

Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Adanya penolakan secara internal dikalangan anggota masyarakat dan penolakan eksternal terhadap pemerintah
- b. Kurang dana
- c. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat; dan
- d. Kurang sesuai dengan kebutuhan.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Mikkelsen (2003) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat itu yaitu:

1. Faktor sosial yaitu dilihat adanya ketimpangan sosial masyarakat untuk berpartisipasi
2. Faktor budaya yaitu adanya kebiasaan atau adat istiadat yang bersifat tradisional statis dan tertutup terhadap pembaharuan
3. Faktor politik yaitu apabila proses pembangunan yang dilaksanakan kurang melibatkan masyarakat pada awal dan akhir proses pembangunan sehingga terkendala untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan

Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

Menurut Depkes (1991) partisipasi masyarakat adalah di mana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga atau kesehatan masyarakat dilingkungannya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan bukan semata-mata karena ketidakmampuan pemerintah dalam upaya pembangunan, melainkan

memang disadari bahwa masyarakat mempunyai hak dan potensi untuk mengenal dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapinya, mengingat sebagian besar masalah kesehatan disebabkan perilaku masyarakat itu sendiri.

Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan, berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakat. Institusi kesehatan hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya.

Partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan didasarkan kepada beberapa hal:

1. Community felt need apabila pelayanan itu diciptakan oleh masyarakat sendiri, berakti masyarakat itu memerlukan pelayanan tersebut, artinya pelayanan kesehatan bukanlah berdasarkan kebutuhan penguasa tapi benar-benar kebutuhan masyarakat itu.
2. Organisasi pelayanan kesehatan masyarakat yang berdasarkan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat, ini

berakti fasilitas pelayanan kesehatan itu timbul dari masyarakat sendiri.

3. Pelayanan kesehatan akan dikerjakan oleh masyarakat sendiri, artinya tenaga dan penyelenggaranya akan ditangani oleh anggota masyarakat itu sendiri yang didasarkan sukarela (Notoatmodjo, 2007).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filosofi partisipasi masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat adalah terciptanya suatu pelayanan untuk masyarakat dan oleh masyarakat.



MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)

1. Pengertian MMD

Musyawaharah Masyarakat Desa (MMD) adalah musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat (FMD) untuk membahas masalah-masalah (terutama yang erat kaitannya dengan kemungkinan KLB, Kegawatdaruratan & Bencana) yang ada di desa serta merencanakan penanggulangannya. Topik yang dibahas fokus kepada hasil SMD yang telah diperoleh.

2. Tujuan MMD

Agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang dihadapi dan dirasakan di wilayahnya. Agar masyarakat

sepakat untuk bersama-sama menanggulangnya Tersusunnya rencana kerja untuk Penanggulangan yang disepakati bersama

3. Peserta MMD

Para kader pelaksana SMD Kepala Desa & perangkat Desa Tokoh Masyarakat setempat (formal & non-Formal) PKK LPM / KPM Karang Taruna, Saka bakti Husadha PMR Beberapa KK yg di SMD Pimpinan Puskesmas & staf Sektor Kecamatan (Sosial, BKKBN, KUA, dll) Ketua Organisasi Masyarakat (NU, Muhammadiyah, Perempuan, Pemuda, Partai)

4. Tempat MMD : Balai Desa

5. Pola penyelenggaraan MMD

Susunan tempat duduk sebaiknya berbentuk lingkaran (round table), tidak ada peserta membelakangi peserta yang lainnya, komposisi jangan seperti diruangan kelas Pimpinan pertemuan duduk sederetan, setara dan berada diantara para peserta, tidak memisah atau duduk dikursi istimewa Duduk tidak harus selalu dikursi, boleh juga dilantai diatas tikar/permadani/matras

6. Suasana MMD

Ciptakan suasana kekeluargaan yang akrab. Jangan ciptakan suasana formal dengan meja yang ditata seperti di meja persidangan.

7. Waktu MMD

Mulailah tepat waktu, sesuai dengan rencana & jadwal, jangan sampai peserta menunggu. Yang mengundang hadir terlebih dahulu, jangan terlambat!

8. Peran Ketua MMD

Mengarahkan pembicaraan agar jangan menyimpang dari arah yang ditetapkan. Menjadi penengah jika terjadi perselisihan pendapat dalam pembicaraan. Mengatur lalu-lintas pembicaraan di antara sesama peserta. Ketua harus selalu berusaha memotivasi setiap peserta. Ketua jangan terlalu banyak berbicara, ketua sebaiknya lebih banyak memandu. Ketua harus sabar, tidak emosional bila ada hal-hal yang menjengkelkan. Ketua harus jeli, cerdik dan segera bisa menangkap apa yang dimaksud oleh peserta. Setiap pendapat harus dihargai, jangan memaksakan kehendak untuk disetujui. Semua keputusan harus berdasarkan musyawarah, bukan paksaan. Ketua harus selalu memantau kepada bahasa tubuh, ekspresi, gerak-gerik peserta, apakah mereka

kelihatan bosan/jengkel mendengarkan , bila perlu diselengi dengan gurauan untuk mencairkan (Ice Breaker)Bila ada hal-hal teknis yang kurang jelas, terutama tentang masalah/info yang berkaitan dengan kesehatan, dapat meminta kejelasan / penjelasan dari dokter Puskesmas / stafnya

9. Langkah-langkah Penyelenggaraan MMD

a. Persiapan

Kader menyiapkan hasil analisis yang ditulis dalam lembar balik kader membantu Kepala Desa menyimpulkan acara, tata ruangan & perlengkapan, Kader memotivasi/mengajak para TOMA, TOGA, pimpinan Ormas yang ada didesa itu untuk hadir dalam MMD, agar dapat membantu memecahkan masalah bersama-sama mengajak kader-kader di desa tersebut yang lainnya untuk ikut hadir,

b. Proses

Pembukaan dengan menguraikan maksud & tujuan MMD dipimpin oleh Kades Pengenalan masalah kesehatan dipimpin bidan penyajian hasil SMD oleh kelompok SMD perumusan & penentuan prioritas masalah kesehatan atas dasar pengenalan masalah & hasil SMD rekomendasi teknis dari bidan

penyusunan rencana pelaksana kegiatan dipimpin KadesPenutup

c. Tindak lanjut

Kader membantu kades menyebarkan hasil Musyawarah tentang Rencana Kerja Penanggulangan masalah dan membantu menindak-lanjuti untuk kegiatan-kegiatan. Selanjutnya, mencari calon kader baru, pelatihan kader & pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut Rencana Kerja hasil MMD Latihan Kader Melaksanakan kegiatan masyarakat dibidang kesehatan memantau/memonitor hasil kegiatan memotivasi warga agar kegiatan dibidang kes dapat dikembangkan baik lokasinya maupun jenis kegiatannya



FOCUS GROUP DISCUSSION

(FGD)

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2007) mendefinisikan FGD adalah *suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok*.

Sesuai namanya, pengertian Focus Group Discussion mengandung tiga kata kunci:

- **Diskusi** (bukan wawancara atau obrolan);
- **Kelompok** (bukan individual);
- **Terfokus/Terarah** (bukan bebas).

Artinya, walaupun hakikatnya adalah sebuah diskusi, FGD tidak sama dengan wawancara, rapat, atau obrolan beberapa orang di kafe-kafe. FGD bukan pula sekadar kumpul-kumpul beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta, padahal aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus.

Sebagai alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer maupun sekunder. FGD berfungsi sebagai metode primer jika digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian atau metode utama (selain metode lainnya) pengumpulan data dalam suatu penelitian. FGD sebagai metode penelitian sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi riset yang bersifat kuantitatif dan atau sebagai salah satu teknik triangulasi. Dalam kaitan ini, baik berkedudukan sebagai metode primer atau sekunder, data yang diperoleh dari FGD adalah data kualitatif.

Di luar fungsinya sebagai metode penelitian ilmiah, Krueger & Casey (2000) menyebutkan, FGD pada dasarnya

juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan, misalnya pengambilan keputusan, *needs assesment*, pengembangan produk atau program, mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya.

1. Kapan FGD Harus Digunakan?

FGD harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode penelitian sosial jika:

- a. Peneliti ingin memperoleh informasi mendalam tentang tingkatan persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan.
- b. Peneliti ingin memahami lebih lanjut keragaman perspektif di antara kelompok atau kategori masyarakat.
- c. Peneliti membutuhkan informasi tambahan berupa data kualitatif dari riset kuantitatif yang melibatkan persoalan masyarakat yang kompleks dan berimplikasi luas.
- d. Peneliti ingin memperoleh kepuasan dan nilai akurasi yang tinggi karena mendengar pendapat langsung dari subjek risetnya.

2. Kapan FGD Tidak Diperlukan?

FGD harus dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagai metode penelitian sosial jika:

- a. Peneliti ingin memperoleh konsensus dari masyarakat/peserta
- b. Peneliti ingin mengajarkan sesuatu kepada peserta
- c. Peneliti akan mengajukan pertanyaan “sensitif” yang tidak akan bisa di-*share* dalam sebuah forum bersama kecuali jika pertanyaan tersebut diajukan secara personal antara peneliti dan informan.
- d. Peneliti tidak dapat meyakinkan atau menjamin kerahasiaan diri informan yang berkategori “sensitif”.
- e. Metode lain dapat menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik
- f. Metode lain yang lebih ekonomis dapat menghasilkan informasi yang sama.

Meskipun terlihat sederhana, menyelenggarakan suatu FGD yang hanya berlangsung 1-3 jam, memerlukan persiapan, kemampuan, dan keahlian khusus. Ada prosedur dan standar tertentu yang harus diikuti agar hasilnya benar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Mengapa FGD?

Irwanto (2006) mengemukakan tiga alasan perlunya melakukan FGD, yaitu alasan filosofis, metodologis, dan praktis.

a. Alasan Filosofis

- 1) Pengetahuan yang diperoleh dalam menggunakan sumber informasi dari berbagai latar belakang pengalaman tertentu dalam sebuah proses diskusi, memberikan perspektif yang berbeda dibanding pengetahuan yang diperoleh dari komunikasi searah antara peneliti dengan responden.
- 2) Penelitian tidak selalu terpisah dengan aksi. Diskusi sebagai proses pertemuan antarpribadi sudah merupakan bentuk aksi.

b. Alasan Metodologis

- 1) Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara individu karena pendapat kelompok dinilai sangat penting.
- 2) Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu relatif singkat.

3) FGD dinilai paling tepat dalam menggalikan permasalahan yang bersifat spesifik, khas, dan lokal. FGD yang melibatkan masyarakat setempat dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai.

c. Alasan Praktis

Penelitian yang bersifat aksi membutuhkan perasaan memiliki dari objek yang diteliti- sehingga pada saat peneliti memberikan rekomendasi dan aksi, dengan mudah objek penelitian bersedia menerima rekomendasi tersebut. Partisipasi dalam FGD memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan memiliki.

Menurut Koentjoro (2005), kegunaan FGD di samping sebagai alat pengumpul data adalah sebagai alat untuk meyakinkan pengumpul data (peneliti) sekaligus alat *re-check* terhadap berbagai keterangan/informasi yang didapat melalui berbagai metode penelitian yang digunakan atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik keterangan yang sejenis maupun yang bertentangan.

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan dalam kaitannya dengan penelitian, FGD berguna untuk:

- a. Memperoleh informasi yang banyak secara cepat;
- b. Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku kelompok tertentu;
- c. Menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam; dan
- d. *Cross-check* data dari sumber lain atau dengan metode lain.

4. **Persiapan dan Desain Rancangan FGD**

Sebagai sebuah metode penelitian, pelaksanaan FGD memerlukan perencanaan matang dan tidak asal-asalan. Untuk diperlukan beberapa persiapan adalah → Membentuk Tim → Memilih Tempat dan Mengatur Tempat → Menyiapkan Logistik → Menentukan Jumlah Peserta → Rekrutmen Peserta.

a. ***Membentuk Tim***

Tim FGD umumnya mencakup:

- 1) **Moderator**, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta

tujuan penelitian yang hendak dicapai (*keampilan substantif*), serta terampil mengelola diskusi (*keampilan proses*).

- 2) **Asisten Moderator/co-fasilitator**, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya FGD, dan ia membantu moderator mengenai: waktu, fokus diskusi (apakah tetap terarah atau keluar jalur), apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab, apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum memperoleh kesempatan berpendapat.
- 3) **Pencatat Proses/Notulen**, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya. Umumnya dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel.
- 4) **Penghubung Peserta**, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta. Biasanya disebut mitra kerja lokal di daerah penelitian.
- 5) **Penyedia Logistik**, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat,

konsumsi, akomodasi (jika diperlukan), insentif (bisa uang atau barang/cinderamata), alat dokumentasi, dll.

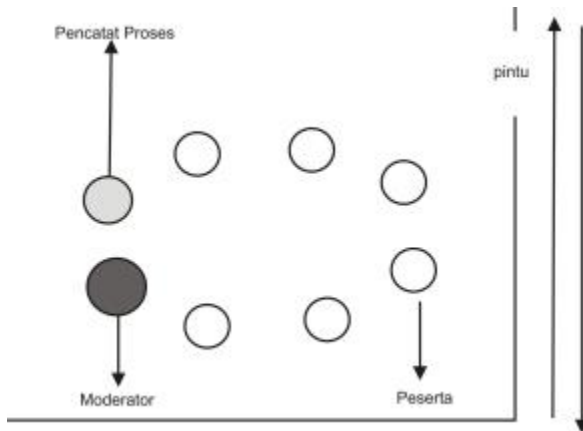
- 6) **Dokumentasi**, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi, terutama perekam selama dan sesudah FGD berlangsung.
- 7) **Lain-lain** jika diperlukan (tentatif), misalnya petugas antar-jemput, konsumsi, bloker (penjaga “keamanan” FGD, dari gangguan, misalnya anak kecil, preman, telepon yang selalu berdering, teman yang dibawa peserta, atasan yang datang mengawasi, dsb)

b. ***Memilih dan Mengatur Tempat***

Pada prinsipnya, FGD dapat dilakukan di mana saja, namun seyogianya tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, tidak bising, berventilasi cukup, dan bebas dari gangguan yang diperkirakan bisa muncul (preman, pengamen, anak kecil, dsb). Selain itu tempat FGD

juga harus memiliki ruang dan tempat duduk yang memadai (bisa lantai atau kursi). Posisi duduk peserta harus setengah atau tiga perempat lingkaran dengan posisi moderator sebagai fokusnya. Jika FGD dilakukan di sebuah ruang yang terdapat pintu masuk yang depannya ramai dilalui orang, maka hanya moderator yang boleh menghadap pintu tersebut, sehingga peserta tidak akan terganggu oleh berbagai “pemandangan” yang dapat dilihat diluar rumah.

Jika digambarkan, layout ruang diskusi dapat dilihat sebagai berikut:



c. ***Menyiapkan Logistik***

Logistik adalah berbagai keperluan teknis yang diperlukan sebelum, selama, dan sesudah FGD terselenggara. Umumnya meliputi peralatan tulis (ATK), dokumentasi (audio/video), dan kebutuhan-kebutuhan peserta FGD: seperti transportasi; properti rehat: alat ibadah, konsumsi (makanan kecil dan atau makan utama); insentif; akomodasi (jika diperlukan); dan lain sebagainya.

Insentif dalam penyelenggaraan FGD adalah suatu hal yang wajar diberikan. Selain sebagai strategi untuk menarik minat peserta, pemberian insentif juga merupakan bentuk ungkapan terimakasih peneliti karena peserta FGD bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mencurahkan pendapatnya dalam FGD. Jika perlu, sejak awal, dicantumkan dalam undangan mengenai insentif apa yang akan mereka peroleh jika datang dan aktif dalam FGD. Mengenai bentuk dan jumlahnya tentu disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki peneliti. Umumnya insentif dapat berupa sejumlah uang atau souvenir (cinderamata).

d. ***Jumlah Peserta***

Dalam FGD, jumlah peserta menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Menurut beberapa literatur tentang FGD (lihat misalnya Sawson, Manderson & Tallo, 1993; Irwanto, 2006; dan Morgan D.L, 1998) jumlah yang ideal adalah **7 -11 orang**, namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu **4-7 orang** (Koentjoro, 2005: 7) atau **6-8 orang** (Krueger & Casey, 2000: 4). Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam. Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan penelitian dan fasilitas yang ada.

e. ***Rekrutmen Peserta: Homogen atau Heterogen?***

Tekait dengan homogenitas atau heterogenitas peserta FGD, Irwanto (2006) mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pemilihan derajat homogenitas atau heterogenitas peserta harus sesuai dengan tujuan awal diadakannya FGD.

- 2) Pertimbangan persoalan homogenitas atau heterogenitas ini melibatkan variabel tertentu yang diupayakan untuk heterogen atau homogen. Variabel sosio-ekonomi atau gender boleh heterogen, tetapi peserta itu harus memahami atau mengalami masalah yang didiskusikan. Dalam mempelajari persoalan makro seperti krisis ekonomi atau bencana alam besar, FGD dapat dilakukan dengan peserta yang bervariasi latar belakang sosial ekonominya, tetapi dalam persoalan spesifik, seperti perkosaan atau diskriminasi, sebaiknya peserta lebih homogen.
- 3) Secara mendasar harus disadari bahwa semakin homogen sebenarnya semakin tidak perlu diadakan FGD karena dengan mewawancarai satu orang saja juga akan diperoleh hasil yang sama atau relatif sama.
- 4) Semakin heterogen semakin sulit untuk menganalisis hasil FGD karena variasinya terlalu besar.
- 5) Homogenitas-heterogenitas tergantung dari beberapa aspek. Jika jenis kelamin, status sosial ekonomi, latar belakang agama homogen, tetapi

dalam melaksanakan usaha kecil heterogen, maka kelompok tersebut masih dapat berjalan dengan baik dan FGD masih dianggap perlu.

- 6) Pertimbangan utama dalam menentukan homogenitas-heterogenitas adalah ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh heterogen dan ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh homogen.

5. Menyusun Pertanyaan FGD

Kunci dalam membuat panduan diskusi yang terarah adalah membuat pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai panduan diskusi. Untuk mengembangkan pertanyaan FGD, lakukan hal-hal berikut:

- a. Baca lagi tujuan penelitian
- b. Baca lagi tujuan FGD
- c. Pahami jenis informasi seperti apa yang ingin Anda dapatkan dari FGD
- d. Bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut
- e. Tulis pertanyaan umum ke khusus. Sebaiknya jangan lebih dari 5 (lima) pertanyaan inti.

- f. Rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari konsep besar yang kabur maknanya.
- g. Uji pertanyaan-pertanyaan tersebut pada teman-teman dalam tim Anda.

Berbeda dengan wawancara, dalam FGD moderator tidaklah selalu bertanya. Bahkan semestinya tugas moderator bukan bertanya, melainkan mengemukakan suatu permasalahan, kasus, atau kejadian sebagai bahan pancingan diskusi. Dalam prosesnya memang ia sering bertanya, namun itu dilakukan hanya sebagai ketrampilan mengelola diskusi agar tidak didominasi oleh sebagian peserta atau agar diskusi tidak macet (Irwanto, 2006)

6. Pelaksanaan FGD

Keberhasilan pelaksanaan FGD sangat ditentukan oleh kecakapan moderator sebagai “Sang Sutradara”. Peran Moderator dalam FGD dapat dilihat dari aktivitas utamanya, baik yang bersifat pokok (secara prosedural pasti dilakukan) maupun yang tentatif (hanya diperlukan jika memang situasi menghendaki demikian). Peran-

peran tersebut adalah membuka FGD, meminta klarifikasi, melakukan refleksi, memotivasi, probing (penggalian lebih dalam), melakukan *blocking* dan distribusi (mencegah ada peserta yang dominan dan memberi kesempatan yang lain untuk bersuara), reframing, refokus, melerai perdebatan, memanfaatkan jeda (pause), menegosiasi waktu, dan menutup FGD.

Dalam pelaksanaan FGD, kunci utama agar proses diskusi berjalan baik adalah permulaan. Untuk membuat suasana akrab, cair, namun tetap terarah, tugas awal moderator terkait dengan permulaan diskusi yaitu

- a. mengucapkan selamat datang,
- b. memaparkan singkat topik yang akan dibahas (*overview*),
- c. membacakan aturan umum diskusi untuk disepakati bersama (atau hal-hal lain yang akan membuat diskusi berjalan mulus), dan
- d. mengajukan pertanyaan pertama sebagai panduan awal diskusi. Untuk itu usahakan, baik pertanyaan maupun respon dari jawaban pertama tidak terlalu bertele-tele karena akan menjadi acuan bagi efisiensi proses diskusi tersebut.

7. Analisis Data dan Penyusunan Laporan FGD

Analisis data dan Penulisan Laporan FGD adalah tahap akhir dari kerja keras peneliti. Langkah-langkahnya dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Mendengarkan atau melihat kembali rekaman FGD
- b. Tulis kembali hasil rekaman secara utuh (membuat transkrip/verbatim)
- c. Baca kembali hasil transkrip
- d. Cari mana masalah-masalah (topik-topik) yang menonjol dan berulang-ulang muncul dalam transkrip, lalu kelompokkan menurut masalah atau topik. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang yang berbeda untuk mengurangi “bias” dan “subjektifitas”. Pengkategorian bisa juga dilakukan dengan mengikuti Topik-topik dan subtopik dalam Panduan diskusi. Jangan lupa merujuk catatan yang dibuat selama proses FGD berlangsung.
- e. Karena berhubungan dengan kelompok, data-data yang muncul dalam FGD biasanya mencakup:
 - 1) Konsensus
 - 2) Perbedaan Pendapat
 - 3) Pengalaman yang Berbeda
 - 4) Ide-ide inovatif yang muncul, dan sebagainya.

- f. Buat koding dari hasil transkripsi menurut pengelompokan masalah/topik, misalnya tentang Permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja dibuat kode:

Kode 1 untuk perilaku seks remaja

Bisa dipecah lagi menjadi:

Kode 1a: aturan/nilai-nilai menyangkut perilaku seks remaja

Kode 1b: pengalaman seksual

Kode 2 untuk masalah kesehatan reproduksi remaja,

Bisa dipecah lagi:

Kode 2a: masalah tiadanya informasi kesehatan reproduksi

Kode 2b: masalah tidak adanya pelayanan untuk remaja, dst

Kode 3 untuk kebutuhan remaja

Menurut Irwanto (2006: 82-86), dalam melakukan analisis FGD, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Periksa dahulu, apakah tujuan FGD tercapai—antara lain terlihat dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan (dieksekusi) apakah sesuai dengan rencana awal?

- b. Adakah perubahan dalam tujuan FGD yang terjadi karena input dari peserta?
- c. Identifikasi masalah utama yang dikemukakan oleh peserta. Untuk itu perhatikan tema sentral dalam TOR FGD.
- d. Adakah variasi peserta dalam persoalan utama ini? Bagaimana variasinya? Mengapa? (Perbedaan-perbedaan yang muncul tersebut ada yang sangat ekstrim sampai yang hanya berbeda sedikit saja. Jika perbedaan ini timbul, keduanya harus disajikan dalam laporan.
- e. Selain persoalan utama itu, adakah persoalan lain (tema-tema lain) yang muncul dalam diskusi? Apa saja? Mana yang relevan dengan tujuan FGD?
- f. Buatlah suatu kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul. Dengan melihat sumber daya peneliti dan stakeholders, pilihlah masalah-masalah apakah dapat diselesaikan dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek atau panjang. Selain itu coba dipilih persoalan yang tidak kunjung selesai, misalnya yang menyangkut perubahan pada tingkat makro (terutama struktur ekonomi dan politik).

- g. Lakukan koding sesuai dengan faktor-faktor yang dikehendaki.

Setelah pekerjaan di atas selesai, baru hasilnya dituliskan atau dilaporkan dengan cara berikut:

- a. Tuliskan topik-topik/masalah-masalah yang ditemukan dari hasil FGD. Setelah itu tuliskan juga “kutipan-kutipan langsung” (apa kata orang yang berdiskusi) mengenai masalah tersebut
- b. Bahas topik-topik atau masalah-masalah yang diungkapkan bersama tim peneliti. Lakukan topik demi topik, sampai semua topik/masalah penting selesai dilaporkan dan dibahas.

Tidak boleh dilupakan, keseluruhan laporan FGD harus memuat poin-poin berikut ini: (a) identitas subjek (untuk kasus tertentu diperlukan deskripsi subjek, bisa ditulis dalam lampiran); (b) tujuan FGD; (c) bentuk FGD; (d) waktu FGD; (e) tempat berlangsungnya FGD; (f) alat bantu dalam FGD; (g) berapa kali dilakukan FGD; (h) tema-tema atau temuan penting dalam FGD, (i) kendala-kendala selama proses FGD; (j) pemahaman-pemaknaan FGD; dan (k) pembahasan hasil FGD.

Catatan Penting:

1. Perlu diingat bahwa jika dalam sebuah wawancara pribadi, peneliti dihadapkan pada data individual—bukan sebuah proses kelompok—maka dalam FGD peneliti akan memperoleh data individu sekaligus kelompok.
2. Semua pekerjaan, mulai dari mengumpulkan data, membahas hasil, mencari topik yang penting dalam transkrip, membahas kembali topik-topik itu, sampai menuliskan laporan harus dilakukan dengan tim atau paling tidak berpasangan untuk menghindari pendapat subjektif pribadi. Bila dilakukan dalam tim maka laporan bisa mendekati keutuhan karena berbagai pandangan saling melengkapi.



PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang ke arah modernisasi. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, semakin terlihat pembangunan yang berkelanjutan dan meluasnya industrialisasi. Proses pembangunan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi, pertama adalah dimensi makro yang menggambarkan bagaimana institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat untuk mempengaruhi proses perubahan suatu masyarakat. Sedangkan kedua adalah dimensi mikro yaitu individu dan kelompok masyarakat yang mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri (Rukminto, 2003).

Pendidikan nonformal sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, akan bisa membuat manusia menjadi lebih maju, berkualitas, dihargai di mata sosial, dan memiliki daya saing tinggi, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan derajat hidup sosial masyarakat dan dapat meningkatkan produktivitas kerja secara personal maupun secara nasional demi kemajuan bangsa dan negara. Konsep pendidikan nonformal merupakan konsep pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yang tidak menikmati pendidikan pada lembaga pendidikan formal, bisa mendapatkan di lembaga pendidikan nonformal, dengan harapan bisa dapat merubah pola pikir masyarakat dan dapat meningkatkan kehidupannya. Sehingga dapat terbentuk kesadaran ingin berusaha dan berjuang untuk merubah hidupnya melalui proses pendidikan nonformal masyarakat dapat diberdayakan (Sulistiani, 2019).

Pada pasal 26 UU No. 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya disebutkan bahwa fungsi dari pendidikan

nonformal adalah mengembangkan potensi peserta didik, dengan penekanan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Untuk lingkup pendidikan nonformal mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Lebih lanjut peraturan perundangan menyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal yang dapat dibentuk antara lain terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan lain yang sejenis. Kelebihan lain yang didapat dari pendidikan nonformal adalah hasil pendidikannya dapat disetarakan dengan hasil pendidikan formal, namun setelah melalui proses penilaian penyeteraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. Pada pasal 52 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan bisa oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Untuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat disebutkan pada pasal 55 undang-undang yang sama bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat para pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pada tahap evaluasi, maka pendidikan nonformal juga sama dengan pendidikan formal, Oleh karenanya akreditasi terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan perlu dilakukan, baik pada jalur formal dan nonformal yang diatur pada pasal 60 UU No. 20 Tahun 2003. Sehingga pada prinsipnya penyelenggaraan pada satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Prinsip pengembangan masyarakat bercorak “human dignity”, pengembangan martabat, potensi, dan energy manusia, “empowering process”, memberdayakan prorangan maupun kelompok, partisipatoris, dan adil. Filosofi pengembangan masyarakat di antaranya adalah : menolong dirinya sendiri, senantiasa mencari dan menemukan pemecahan masalah secara bersama-sama, ada pendampingan secara teknis maupun praktis, demokratis, dan menyuburkan kepemimpinan local yang tangguh dan di

percaya. Pemberdayaan sekurangnya meliputi aspek-aspek fisik, intelektual, ekonomi, politik, cultural. Artinya, pemberdayaan itu mencakup pengembangan kemanusiaan secara total.

Aspek keadilan mencakup:

1. Punya kesamaan hak dalam memperoleh pelayanan social
2. Menyangkut hak-hak dasar
3. Berkembang dalam kesamaan
4. Menguntungkan
5. Berkenaan hasrat atau kebutuhan individual untuk andil bagi Kepentingan bersama
6. Optimal memanfaatkan secara wajar apa yang telah tercipta di dunia ini
7. Lebih bercorak moral ketimbang hokum
8. Erat berkaitan dengan kebutuhan manusiawi khususnya.

Peluang pendidikan non formal menyentuh aspek-aspek pemberdayaan jauh lebih besar, karena pembelajaran dalam pendidikan nonformal hubungan yang bersifat individual dan berpusat pada peserta didik. Program-program pendidikan non formal berorientasi pada pengembangan

sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, lapangan kerja, wirausaha dan sector pembangunan umumnya.

Pendidikan non formal pada dasarnya terselenggara atas kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar yang tumbuh di masyarakat itu sendiri. Masalahnya adalah kondisi sumberdaya manusia yang ada di masyarakat itu sendiri yang masih belum mampu mendayakan potensi yang ada, sehingga di perlukan sentuhan dari luar yang dapat memotivasi dan memacu masyarakat, di sinilah peran pendidikan nonformal sangat di perlukan. Persoalan mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja abad 21 adalah persoalan pendidikan, termasuk melalui pendidikan non formal, oleh karena itu, tanggung jawab bidang pendidikan merupakan fungsi yang sangat strategis sebagai upaya dasar dan merupakan titik sentral dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia (Soedomo, 1989) Menurut Coombs, PNF telah menjalankan fungsi mengembangkan wawasan, mengalihkan pengetahuan, melatih keterampilan, serta mengembangkan aspirasi belajar masyarakat.

Harbison (1973), PNF menjalankan berbagai fungsi:

1. untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi mereka yang telah mempunyai pekerjaan
2. untuk mempersiapkan angkatan kerja terutama para generasi muda yang akan memasuki lapangan kerja, dan
3. untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang dunia kerja.

Axin (1976), mengungkapkan, tergantung pada kesadaran kesengajaan dalam proses pembelajaran. Kegiatan dalam PNF tidak hanya terbatas dalam kegiatan tertentu saja, namun bisa terkait dengan berbagai program, yaitu development (Boyle, 1981) Fenomena pendidikan tersebut, baik sebagai proses, sebagai kesadaran tujuan, maupun sebagai program kegiatan telah lama ada dan terjadi dan terjadi dalam khasanah kehidupan kita. Keberadaan PNF telah membantu memecahkan masalah yang di hadapi seseorang, kelompok, maupun kelembagaan. Bahkan ada masyarakat kita yang tidak puas dengan pendidikan formal beralih ke PNF. Telah banyak yang memecahkan masalah karena latar belakang PNF. Kenyataan tersebut perlu di akui

bahwa PNF cukup teruji kehebatannya dan cukup adaptif untuk memecahkan masalah.

Peran PNF dalam proses pemberdayaan (Kindervatter, 1979):

1. Kebudayaan edukatif yang meliputi kategori kualitas: melek huruf, melek pendidikan dasar, memiliki keterampilan, pengetahuan, kreatif, inovatif, dan sebagainya.
2. Keberdayaan ekonomi, yaitu mampu memahami dan mengendalikan factor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga dapat berpartisipasi secara produktif dan efisien dalam pembangunan, serta memperoleh hasil dari pembangunan
3. Keberdayaan politik, mampu memahami fenomena dan kebijakan politik yang mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosialnya, sehingga dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagai warga Negara secara maksimal.
4. Keberdayaan hokum, memahami dan mengendalikan regulasi social, aturan yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga mendapatkan perlakuan dan perlindungan hokum secara adil.

Tahap kegiatan yang perlu dilakukan melalui PNF dalam memberdayakan masyarakat:

1. menetapkan kebutuhan riil yang secara nyata dianggap memerlukan adanya pemenuhan yang sangat mendesak, struktur ekonomi masyarakat, pendidikan, jenis pekerjaan, waktu senggang dan kondisi potensi lingkungan fisik;
2. menetapkan prioritas kebutuhan;
3. perumusan tujuan;
4. penetapan alternative pemecahan masalah;
5. pelaksanaan kegiatan.

Membangun masyarakat dari wacana berfikir yang statis tradisional menjadi dinamis rasional adalah aktivitas pendidikan. Bahkan keseluruhan proses kegiatan pembangunan masyarakat desa/kota “rural and urban community development” itu memerlukan “community education”. Pada umumnya segala kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu usaha pendidikan non formal yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, mapan, lebih sejahtera, dan lebih tanggap terhadap perubahan zaman.

Menurut Sudjana (2000), agar pendidikan nonformal dapat memberdayakan masyarakat maka harus didasarkan pada lima strategi dasar yaitu:

1. Pendekatan Kemanusiaan (Humanistic Approach)
Masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan dan masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang sedemikian rupa ditumbuhkan agar mampu membangun dirinya
2. Pendekatan Partisipatif (Participatory Approach)
Mengandung arti bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
3. Pendekatan Kolaboratif (Collaborative Approach)
Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain (terintegrasi) dan terkoordinasi dan sinergi
4. Pendekatan Berkelanjutan (Continuing Approach)
Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan dan untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat menjadi hal yang paling pokok

5. Pendekatan Budaya (Cultural Approach)

Penghargaan budaya dan kebiasaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan lima pendekatan diatas, jika dipahami betul oleh para agent pembaharu (social change), termasuk didalamnya tenaga kependidikan pendidikan Nonformal, akan memberikan kemudahan dalam menganalisis, mengembangkan dan melaksanakan program- program pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah yang sesuai serta dibutuhkan warga masyarakat. Artinya program pendidikan yang dilaksanakan menyentuh dan mengangkat warga belajar/masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan (ekonomi), kesadaran akan lingkungan sosialnya atau warga belajar/masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana membangun dirinya (memberdayakan dirinya).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boyle, P.G. 1981. Planning Better Program. New York. Mc. Graw-Hill Book Company.
- Harbison, Frederick H. 1973. Human resources as the wealth of nations. New York: Oxford University Press.
- Irwanto, 2007. Focus Group Discussion: Sebuah Pengantar Praktis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Krueger & Casey (2000). A Practical Guide for Applied Research. California: Sage Publication Publish.
- Kindervatter, 1979. Non Formal Education; As An Empowdering Process. New York: Printers in The United Stated Of America.
- Koentjoroningrat (2005). Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mikkelsen. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Notoatmodjo, S. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ 2005. Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rukminto. A. (2003). Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI,
- Sheafor,W.B.,Horejsi, R.C. 2003. Techinques and Guidelines for Social Work Practice. Boston: Allyn & Bacon.
- Sudjana, Nana. 2000. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Suhartini, Rr. et.al. 2005. Model-model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sulistiani, 2019. Peran Pendidikan Non Formal Berbasis Sosial Ekonomi Dalam Organisasi Sosial Preman Super Di Malang Raya. JPIPS: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 5, No. 2, Juni 2019.

- Soedomo, 1989. Pendidikan Luar Sekolah kearah pengembangan sistem belajar masyarakat. Jakarta. P2LPTK.
- Soetomo. 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Soetomo.2011. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antesisnya? Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Profil Penulis



M. Kamali Zaman adalah dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Lahir di Selat Panjang (Kepulauan Meranti), 10 November 1989. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Kesehatan masyarakat di STIKes Hang Tuah Pekanbaru (2010) serta menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Lingkungan pada program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Riau (2015). Saat ini, bertugas sebagai Sekretaris Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Email kamalizaman@htp.ac.id



Winda Septiani, SKM, M.Kes, lahir di Kota Bagansiapiapi tanggal 11 September 1990. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Kesehatan Masyarakat dan pendidikan S2 di

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Provinsi Riau pada tahun 2015. Sejak pada tahun 2011 sampai dengan sekarang penulis mengajar di Program Studi Kesehatan Masyarakat (Prodi Kesmas). Penulis aktif di berbagai organisasi seperti IAKMI Riau, PERGIZI PANGAN Riau. Penulis aktif didalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan telah mempublikasikan beberapa hasil penelitian (artikel) di jurnal nasional terakreditasi SINTA.



Ahmad Satria Efendi adalah dosen pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Lahir di Kumantan (Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau), 13 September 1987.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru pada tahun 2010 serta menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru pada tahun 2013. Saat ini bertugas sebagai Dosen Tetap di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Email satria_efendi@htp.ac.id.